

Rapor Merah KPK: 22 Catatan Kritis Masyarakat Sipil untuk Kinerja KPK Semester I

Revisi UU KPK dan terpilihnya pimpinan KPK periode 2019-2023 sangat menentukan kinerja KPK saat ini



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
 Indonesia
the global coalition against corruption



Pandangan publik terhadap KPK menjadi berubah



Ada 22 masalah dalam kinerja sektor internal organisasi, sektor penindakan dan sektor pencegahan



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
 Indonesia
the global coalition against corruption

Penindakan

1. Jumlah tangkap tangan merosot tajam
2. Menghasilkan banyak buronan
3. Tidak menyentuh perkara besar
4. Gagal melakukan tangkap tangan
5. Sengkarut penanganan perkara
6. Abai dalam perlindungan saksi

Pencegahan

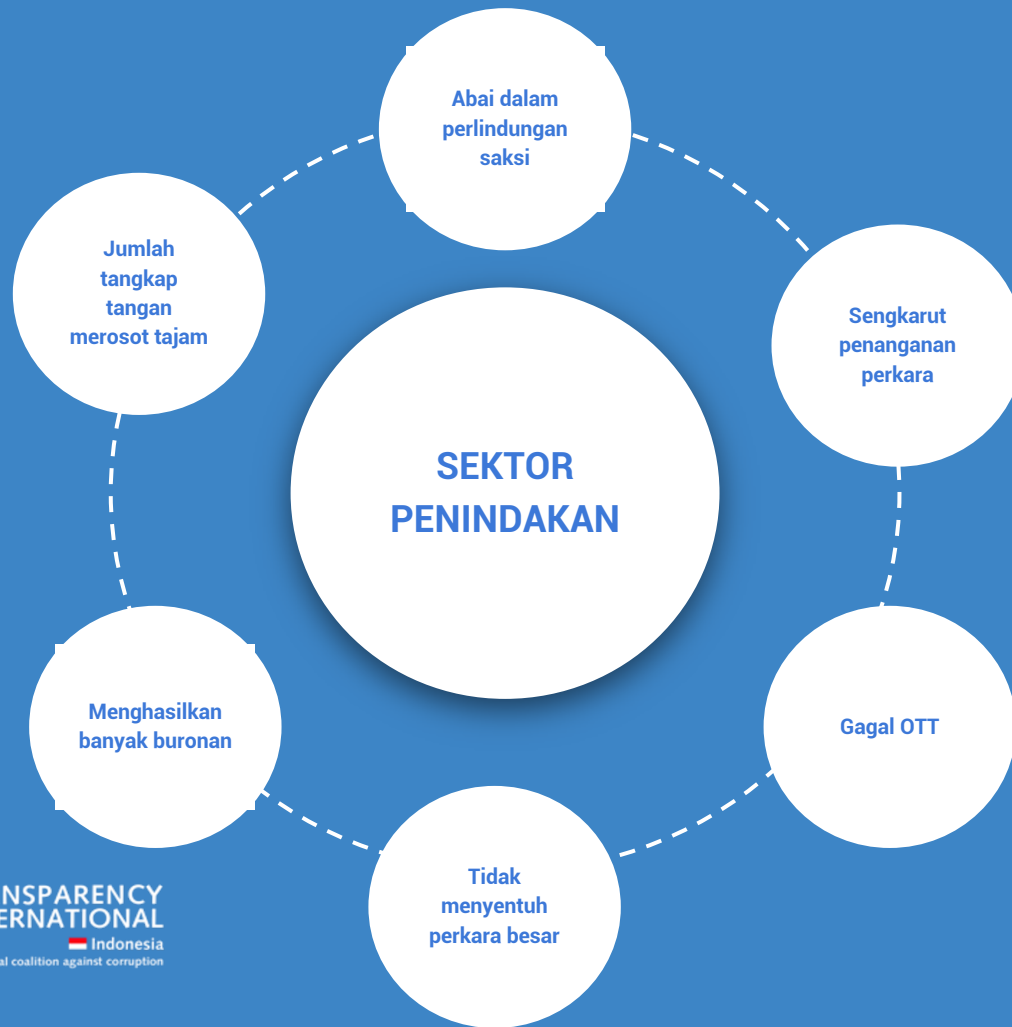
7. Koordinasi dan supervisi dengan APH dan Pemda tidak optimal
8. Minim strategi baru untuk mencegah kerugian keuangan negara
9. Pencegahan korupsi di sektor strategis stagnan
10. Stranas PK belum efektif

Internal Organisasi

11. Pengembalian paksa penyidik ke instansi asal
12. Sesat pikir publikasi penghentian penyidikan
13. Akses informasi publik tertutup
14. Upaya intervensi pemanggilan saksi
15. Kental gimik politik
16. Perlakuan khusus tersangka
17. Mempertontonkan tersangka dalam konferensi pers
18. Ragam persoalan Seleksi Jabatan Internal
19. Tafsir keliru peradilan *in absentia*
20. Absen merespon isu Pemerintah
21. Transisi status pegawai jalan di tempat
22. Tanda tanya Dewan Pengawas

SEKTOR INTERNAL ORGANISASI

• Pengembalian paksa penyidik ke instansi asal	• Mempertontonkan tersangka dalam konferensi pers
• Sesat pikir publikasi penghentian penyidikan	• Ragam persoalan Seleksi Jabatan Internal
• Akses informasi publik tertutup	• Tafsir keliru peradilan <i>in absentia</i>
• Upaya intervensi pemanggilan saksi	• Absen merespon isu Pemerintah
• Kental gimik politik	• Transisi status pegawai jalan di tempat
• Perlakuan khusus tersangka	• Tanda tanya Dewan Pengawas





REKOMENDASI



Kinerja Internal Organisasi

- Meminimalisir *gimmick* politik di tengah situasi pelik pemberantasan korupsi;
- Menjamin adanya perlindungan kepada Penyelidik atau pun Penyidik yang sedang menjalankan tugas;
- Mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam mengeluarkan kebijakan;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap seleksi pejabat internal;
- Segera menyelesaikan Rencana Strategis KPK 2019-2023 secara inklusif dan partisipatif;

Kinerja Sektor Penindakan

- Bersikap objektif dan independen ketika menangani sebuah perkara yang terafiliasi dengan wilayah politik;
- Mempercepat penanganan perkara yang selama ini menjadi tunggakan di KPK;
- Fokus pada perkara korupsi dengan skala kerugian negara yang besar;

REKOMENDASI



Kinerja Sektor Pencegahan

- Strategi pencegahan harus masuk untuk intervensi korupsi di sektor politik
- Mendorong kerja penindakan dan pencegahan yang terintegrasi
- Meningkatkan kinerja koordinasi dan supervisi dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah dengan memperkuat SPPT-TI dan SPDP Online, serta penguatan program MCP KPK
- Reformulasi strategi pencegahan kerugian keuangan negara yang lebih efektif, yang berfokus pada perbaikan tata kelola manajemen aset pemerintah daerah
- Memaksimalkan penggunaan UU Tindak Pidana Pencucian Uang untuk meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara
- Mengakselerasi program pencegahan korupsi di sektor strategis, meliputi sektor politik, swasta, sumber daya alam, serta pandemi Covid-19
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi agar meningkatkan efektivitas Stranas PK

TERIMA KASIH



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
 Indonesia
the global coalition against corruption